LAPORAN ANALISIS SURVEI
INDEKS PERSEPSI PELAYANAN (IPP) DAN
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
BULAN MARET 2025

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
PENDAHULUAN SURVEI DAN KUESIONER SURVEI

A. Pendahuluan Survei

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan Unit Kerja Eselon II di bawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan. Fungsi yang diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM;
b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
d. penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM;
e. penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi dalam rangka pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona lntegritas (PMPZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan Survei IPP/IPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Kuesioner Survei

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit Biro Perencanaan dan Keuangan, dilakukan survei terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi melalui link https://tinyurl.com/surveibirorenkeu. Berdasarkan link tersebut berikut pertanyaan, kategori jawaban, dan Ringkasan dari pertanyaan survei IPP dan IPAK yang dapat dilihat pada **Tabel 1.1** dan **Tabel 1.2**

Tabel 1.1
Kuesioner Survei IPP

A. Kualitas Pelayanan Publik			
No.	**Pertanyaan**	**Jawaban**	**Ringkasan**
1	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan pemenuhan persyaratan pelayanan ?	○ Sangat Tidak Mudah ○ Tidak Mudah ○ Kurang Mudah ○ Cukup Mudah ○ Mudah ○ Sangat Mudah	Persyaratan Pelayanan
2	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan?	○ Sangat Tidak Mudah ○ Tidak Mudah ○ Kurang Mudah ○ Cukup Mudah ○ Mudah ○ Sangat Mudah	Prosedur / Alur Pelayanan
3	Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Waktu Pelayanan
4	Apakah menurut penilaian Saudara jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Jangka waktu penyelesaian
5	Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau aplikasi sistem dalam pelayanan?	○ Sangat Lambat ○ Lambat ○ Kurang Cepat ○ Cukup Cepat ○ Cepat ○ Sangat Cepat	Kecepatan petugas pelayanan/sistem pelayanan online
6	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kejelasan informasi tentang biaya pelayanan?	○ Sangat Tidak Jelas ○ Tidak Jelas ○ Kurang Jelas ○ Cukup Jelas ○ Jelas ○ Sangat Jelas	Biaya Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

A. Kualitas Pelayanan Publik			
No.	**Pertanyaan**	**Jawaban**	**Ringkasan**
7	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kesesuaian produk/jasa layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai Sangat Sesuai	Produk/ Jasa Layanan
8	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kompetensi petugas dalam pelayanan ?	○ Sangat Tidak Memadai ○ Tidak Memadai ○ Kurang Memadai ○ Cukup Memadai ○ Memadai ○ Sangat Memadai	Kompetensi
9	Apakah menurut penilaian Saudara, petugas sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik (tulisan atau verbal) ?	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju Sangat ○ Setuju	Perilaku
10	Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Baik ○ Tidak Baik ○ Kurang Baik ○ Cukup Baik ○ Baik ○ Sangat Baik	Konsultasi dan Pengaduan
11	Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Lengkap ○ Tidak Lengkap ○ Kurang Lengkap ○ Cukup Lengkap ○ Lengkap ○ Sangat Lengkap	Sarana / Prasarana Pelayanan
12	Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Persyaratan Layanan
13	Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik?	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju ○ Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Informasi pelayanan
14	Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Informasi Biaya Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1. 2
Kuesioner Survei IPAK

B. Persepsi Anti Korupsi			
No.	**Pertanyaan**	**Jawaban**	**Ringkasan**
1.	Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju ○ Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Diskriminasi
2.	Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi kecurangan	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju ○ Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Kecurangan
3.	Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju ○ Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Gratifikasi
4	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju ○ Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Pungli
5	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju ○ Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Percaloan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Berdasarkan surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.02.25.87 tanggal 4 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2025, terdapat beberapa aturan pelaksaan SPKP dan SPAK pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan survei dilaksanakan secara online menggunakan tautan dari aplikasi SAPA APIP yang telah terintegrasi dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk unit kerja non UPP, hasil pengisian survei hanya akan menghasilkan nilai SPKP dan SPAK.
2. Survei dilakukan terhadap seluruh layanan yang ada pada unit kerja dan dilakukan setiap bulan kepada seluruh penerima layanan pada periode bersangkutan.
3. Responden merupakan penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%).

B. Metode Pencacahan

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif berdasarkan skala *likert* dengan kategori skala 1-6 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

SKALA	KRITERIA								
1	Sangat Tidak Mudah	Sangat Tidak Sesuai	Sangat Lambat	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Lengkap	Sangat Tidak Sesuai	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Jelas	Sangat Tidak Memadai
2	Tidak Mudah	Tidak Sesuai	Lambat	Tidak Baik	Tidak Lengkap	Tidak Sesuai	Tidak Setuju	Tidak Jelas	Tidak Memadai
3	Kurang Mudah	Kurang Sesuai	Kurang Cepat	Kurang Baik	Kurang Lengkap	Kurang Sesuai	Kurang Setuju	Kurang Jelas	Kurang Memadai
4	Cukup Mudah	Cukup Sesuai	Cukup Cepat	Cukup Baik	Cukup Lengkap Lengkap	Cukup Sesuai	Cukup Setuju	Cukup Jelas	Cukup Memadai
5	Mudah	Sesuai	Cepat	Baik	Lengkap	Sesuai	Setuju	Jelas	Memadai
6	Sangat Mudah	Sangat Sesuai	Sangat Cepat	Sangat Baik	Sangat Lengkap	Sangat Sesuai	Sangat Setuju	Sangat Jelas	Sangat Memadai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Nilai survei dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pertanyaan yang terbagi menjadi 2 kategori yaitu, **Kualitas Pelayanan Publik (IPP)** dan **Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**. Langkah-langkah analisis data meliputi :

1. Data dari isian kuisioner dari setiap responden tersebut dimasukkan ke dalam tabulasi
   a. IPP, pertanyaan 1 (U1) sampai dengan pertanyaan 14 (U14) sesuai dengan urutan dalam kuisioner
   b. IPAK, pertanyaan 1 (P1) sampai dengan pertanyaan 5 (P5) sesuai dengan urutan dalam kuesioner
2. Cara perhitungan survei IPP dan IPAK yaitu pertama, dihitung dengan menjumlahkan total bobot setiap unsurnya lalu dilanjutkan dengan membagi dengan jumlah responden lalu rata-ratakan total bobot per unsur yang telah dibagi dengan jumlah unsur dengan rumus seperti dibawah ini:

$$\text{Nilai Rerata Per Unsur} = \frac{\sum \text{Nilai Perunsur}}{\sum \text{Jumlah Responden}}$$

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{Nilai Rerata Per Unsur}}{\sum Unsur}$$

Setelah nilai kedua survei didapat dengan perhitungan diatas dilanjutkan dengan menghitungkan Nilai indeksnya dengan rumus berikut :

$$\text{Index} = \frac{(\text{Nilai} \times \frac{10}{6})}{2.5}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Adapun hasil survei IPP dan IPAK Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dimonitor melalui aplikasi SAPA APIP dengan domain https://sapaapip.pom.go.id/admin/login. Pada bulan Maret 2025 terdapat total 6 Responden dan berdasarkan berdasarkan surat Inspektorat Utama perihal Pengembangan Aplikasi SAPA APIP Modul IPP v2 dan IPAK v2 dengan perubahan ketentuan jumlah responden yang digunakan menjadi seluruh penerima layanan dalam 1 bulan maka data seluruh responden digunakan. Pada survei IPP terdapat 8 dari 14 pertanyaan yang mewakili unsur pelayanan terdapat pada U2, U4, U5 dan U10 – U14 dan pada survei IPAK terdapat 5 pertanyaan yaitu pada P1 - P5. Adapun hasil analisis dari kedua survei tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1
Hasil Analisis Survei IPP dan IPAK

	IPP								IPAK				
Index	3,82								3,89				
Nilai	5,73								5,83				
Index Per Unsur	3,89	3,78	3,44	3,78	3,89	3,89	3,89	4,00	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
Nilai Rerata Per Unsur	5,83	5,67	5,17	5,67	5,83	5,83	5,83	6,00	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Jumlah Responden	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Jumlah Nilai Perunsur	35	34	31	34	35	35	35	36	35	35	35	35	35
	U2	U4	U5	U10	U11	U12	U13	U14	P1	P2	P3	P4	P5

Berdasarkan **Tabel 3.1** hasil Survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan pada tanggal 1 s.d 31 Maret 2025, diperoleh nilai indeks dari kelompok unsur pertanyaan survei IPP adalah **3,82** dan pada kelompok unsur pertanyaan survei IPAK diperoleh indeks sebesar **3,89.**

Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan, perhitungannya dengan menggunakan IPP mempunyai target sebesar **3,75**. Dari hasil perhitungan IPP bulan Maret 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

maka capaian indikator dimaksud sebesar **101,87%** dari target IPP Biro Perencanaan dan Keuangan

Trend hasil survei IPP IPAK Bulan Januari – Maret 2025 dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**

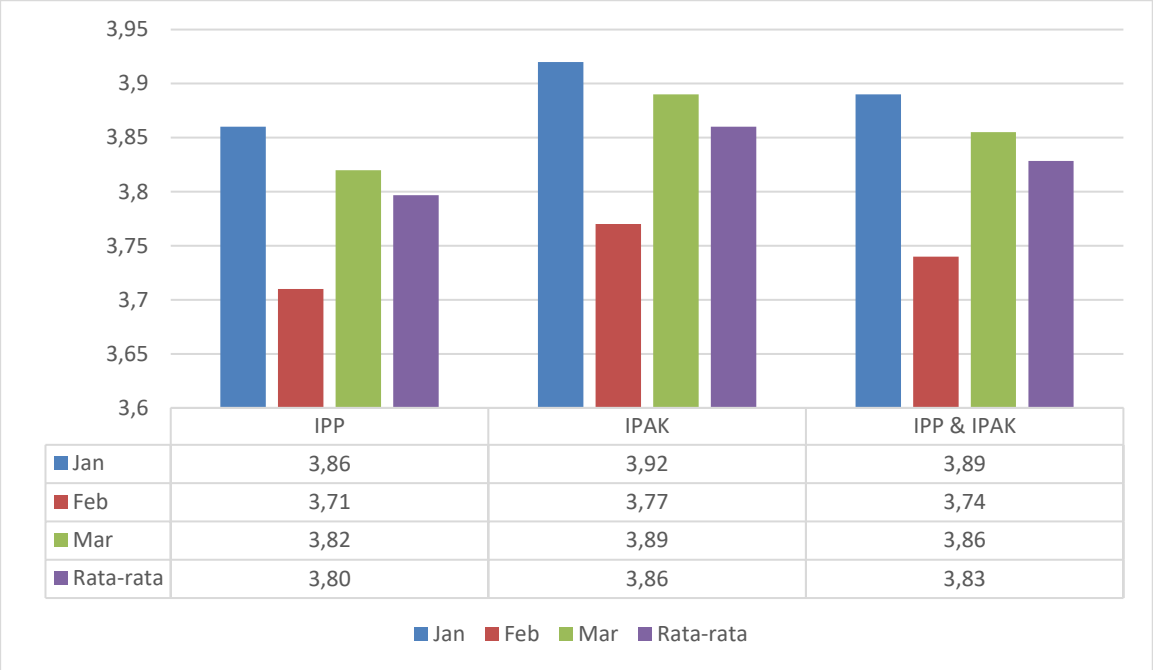

	IPP	IPAK	IPP & IPAK
Jan	3,86	3,92	3,89
Feb	3,71	3,77	3,74
Mar	3,82	3,89	3,86
Rata-rata	3,80	3,86	3,83

Gambar 3.1
Trend Hasil Survei IPP IPAK Bulan Januari – Maret 2025

Pada **Gambar 3.1** hasil survei IPP selama periode Januari s.d Maret 2025, Analisis tren hasil survei IPP dan IPAK periode Januari hingga Maret 2025 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada bulan Februari, sebelum mengalami peningkatan kembali pada bulan Maret. Nilai IPP tertinggi tercatat pada bulan Januari sebesar 3,86, menurun pada Februari menjadi 3,71, dan kembali naik menjadi 3,82 di bulan Maret. Sementara itu, nilai IPAK juga mengalami pola serupa, yaitu dari 3,92 pada Januari, turun ke 3,77 di Februari, lalu naik kembali menjadi 3,89 pada Maret. Secara rata-rata triwulan, IPP berada di angka 3,80 dan IPAK di angka 3,86. Keduanya melampaui target minimum yang ditetapkan sebesar 3,75. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dan integritas unit kerja secara umum tetap terjaga. Ke depan, tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi kinerja agar tidak terjadi penurunan seperti di bulan Februari, serta terus mendorong perbaikan pada aspek pelayanan yang masih dinilai kurang optimal oleh pengguna layanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Hasil survei IPP dan IPAK diurutkan dari tertinggi dapat dilihat pada **Tabel 3.2** dan **Tabel 3.3**.

Tabel 3.2
Nilai rata-rata unsur pertanyaan survei IPP

Nomor Pertanyaan	Ringkasan	Bobot	Target
11	Sarana / Prasarana Pelayanan	3,89	3,75
12	Persyaratan Layanan	3,89	
13	Informasi pelayanan	3,89	
14	Informasi Biaya Pelayanan	3,89	
4	Jangka waktu penyelesaian	3,78	
10	Konsultasi dan Pengaduan	3,78	
5	**Kecepatan petugas pelayanan/sistem pelayanan online**	**3,44**	

Tabel 3.3
Nilai rata-rata unsur pertanyaan survei IPAK

Nomor Pertanyaan	Ringkasan	Bobot	Target
1	Diskriminasi	3,89	3,75
2	Kecurangan	3,89	
3	Gratifikasi	3,89	
4	Pungli	3,89	
5	Percaloan	3,89	

Realisasi IPP bulan Maret 2025 secara rata-rata telah melampaui target IPP-IPAK Biro perencanaan yaitu 3,75, tetapi masih ada satu kategori yang dibawah target yaitu Kecepatan petugas pelayanan/sistem pelayanan online.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun Rencana Tindak Lanjut perbaikan pada **Tabel 3.4** dan **Tabel 3.5**.

Tabel 3.4
Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei IPP

Kode Pertanyaan	Ringkasan	RTL	*Timeline*
U10 – IPP	Konsultasi dan Pengaduan	Pembuatan Ruang Konsultasi	Bulan Januari R Konsultasi Rorenkeu
U4 – IPP	Jangka waktu penyelesaian	1. Reviu SOP 2. Reviu standar pelayanan publik	1. TW IV 2. TW I
U5 – IPP	Kecepatan petugas pelayanan/siste m pelayanan online	Internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK dan budaya kerja PIKKIR dijadwalkan rutin	Rencana pelaksanaan rutin berkala mulai TW I sd TW IV tahun 2025
U14 – IPP	Informasi Biaya Pelayanan	Sosialisasi secara berkala pelayanan publik Biro Perencanaan dan Keuangan melalui kanal/medsos seperti Instagram, Facebook, Youtube dan *subsite* Biro Perencanaan dan Keuangan	Sosialisasi melalui kanal/ medsos direncanakan rutin dan berkala diaksanakan
U11 – IPP	Sarana / Prasarana Pelayanan	Sosialisasi secara berkala pelayanan publik Biro Renkeu melalui kanal/medsos seperti Instagram, Facebook, Youtube dan subsite Biro Renkeu (untuk saat ini subsite masih menggunakan website dengan domain google)	Sosialisasi melalui kanal/ medsos direncanakan rutin dan berkala diaksanakan
U12 – IPP	Persyaratan Layanan	1. Reviu SOP 2. Reviu standar layanan	1. Triwulan IV 2. Triwulan 1
U13 – IPP	Informasi pelayanan	Sosialisasi secara berkala pelayanan publik Biro Renkeu melalui kanal/medsos seperti Instagram, Facebook, Youtube dan subsite Biro Renkeu (untuk saat ini subsite masih menggunakan website dengan domain google)	Sosialisasi melalui kanal/ medsos direncanakan rutin dan berkala diaksanakan
U2 – IPP	Prosedur Layanan	Reviu SOP	TW IV

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3.5
Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei IPAK

RTL	*Timeline*
1. Sosialisasi kepada *stakeholder* melalui kanal/ medsos direncanakan rutin dan berkala dilaksanakan. 2. Monitoring dan evaluasi pengaduan pengguna layanan (masyarakat). 3. Internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK dan budaya kerja PIKKIR dijadwalkan rutin dilaksanakan minimal 2 kali dalam sebulan 4. Pelatihan pelayanan prima bagi petugas pelayanan, termasuk pemanfaatan IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*).	Rencana pelaksanaan rutin berkala mulai TW I sd TW IV tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

Pada pelaksanaan survei IPP dan IPAK untuk layanan yang diberikan pada bulan Maret 2025 data yang diperoleh 6 Responden pada periode pelaksanaan 1 s.d 31 Maret 2025. Grafik data responden survei IPP dan IPAK yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Data 6 Responden Survei

No.	Nama	Usia	No. HP	Jenis Kelamin
1	Adielwin Christo Setio Tally	29	0811491105	L
2	Mellia rahmi	31	082137029231	P
3	Dewi Arun Sari	34	087887182623	P
4	Muhamad Jafarudin	46	08127877783	L
5	Dwita Hidayatu Rahmawati	32	085729182524	P
6	Atminah Ari Purbowati	46	081273270049	P

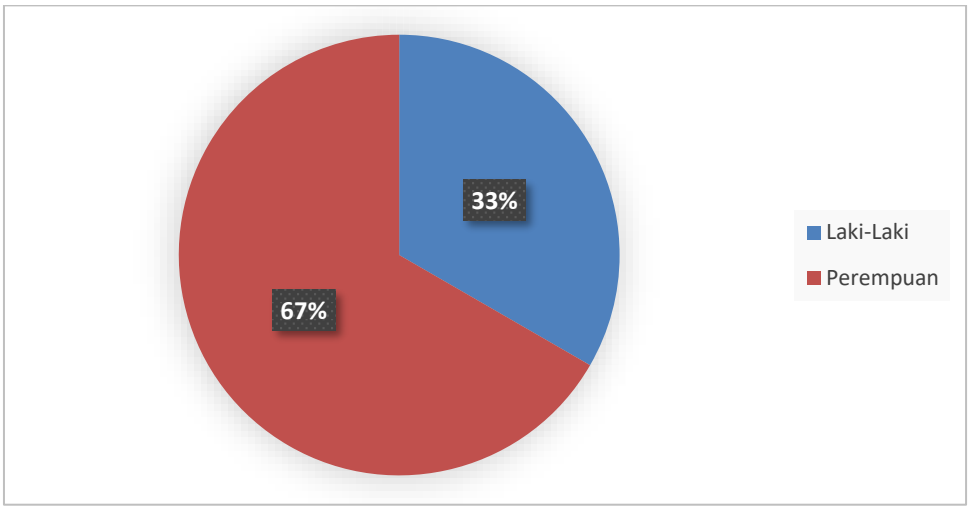

Gambar 4.1
Sebaran Responden Survei IPP IPAK Biro Perencanaan dan Keuangan Bulan MARET 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

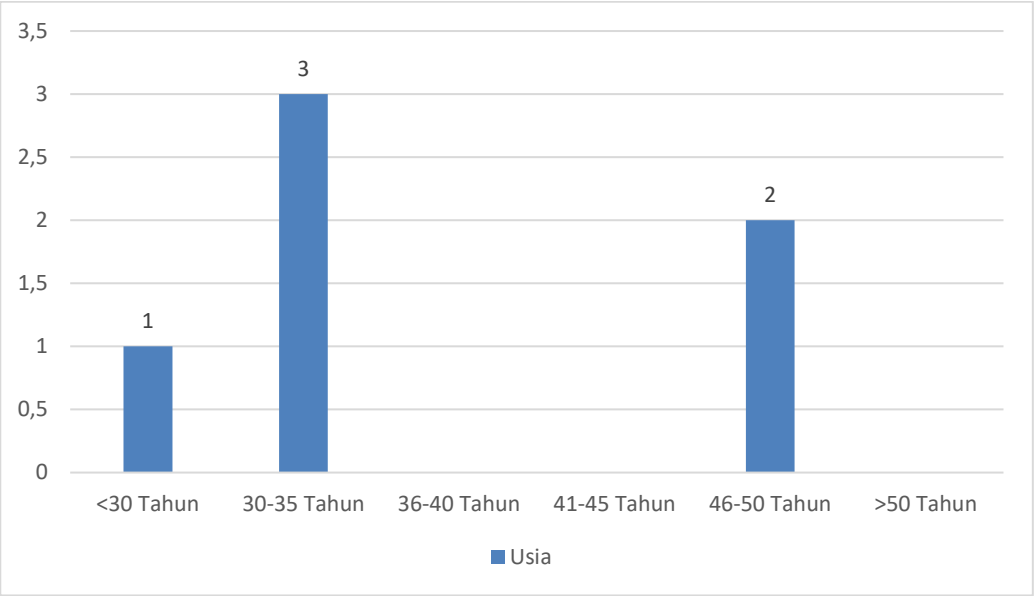

Gambar 4.2
Sebaran Responden Survei IPP IPAK Biro Perencanaan dan Keuangan Bulan MARET Berdasarkan Usia

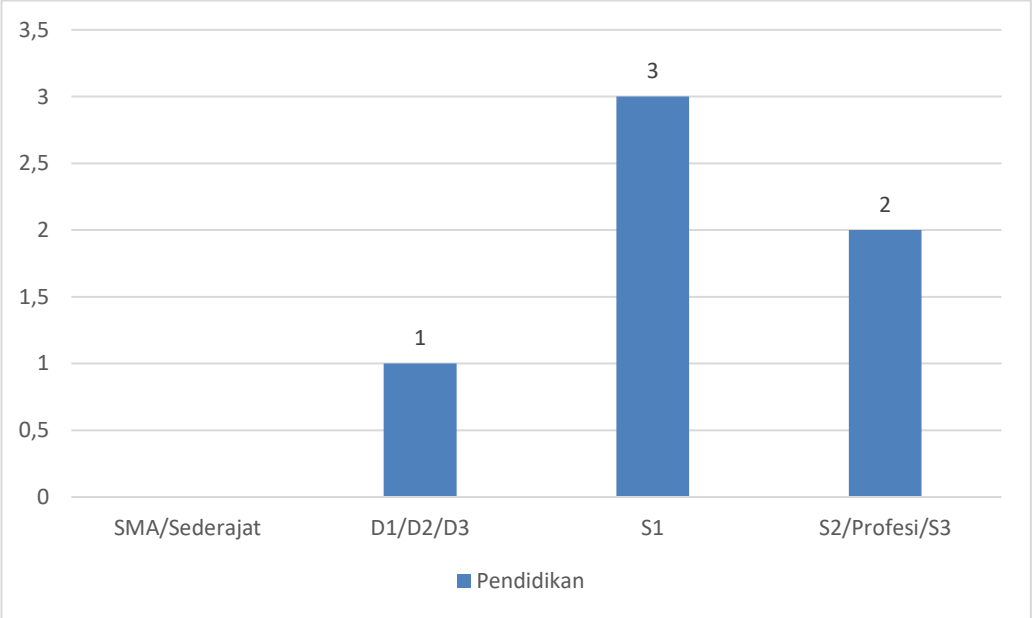

Gambar 4.3
Sebaran Responden Survei IPP IPAK Biro Perencanaan dan Keuangan Bulan MARET 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan grafik pada **Gambar 4.1**, dapat terlihat bahwa responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki dengan perbandingan responden perempuan (66,67%) dan responden laki-laki (33,33%%). Hal ini dipengaruhi oleh komposisi pegawai di lingkungan Badan POM yang terdiri dari ± 64% perempuan. Jika dilihat berdasarkan rentang usia sesuai grafik pada **Gambar**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.2, responden terbanyak pada rentang 30-35 tahun yaitu 3 orang dari 6 Responden. Sedangkan untuk rentang usia lainnya sebagai berikut: usia 46-50 tahun sejumlah 2 orang, usia kurang dari 30 tahun sejumlah 1 orang dan tidak ada responden pada rentan usia 36-40, 41-45 dan diatas 50 tahun. Sesuai dengan grafik pada **Gambar 4.3,** sebagian besar responden berpendidikan D4/S1 dengan jumlah 3 orang dari 6 jumlah responden yang melakukan survei dan sisanya terbagi dari tingkat pendidikan D1/D2/D3 dan S2/Profesi.

B. Data Dukung Lainnya (Pelaksanaan)

Dalam pelaksanaan layanan dibutuhkan masukan dari *stakeholder* terkait layanan yang diberikan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan. Adapun saran terkait Layanan pada Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada **Tabel 4.2**

Tabel 4.2
Saran dan Masukan Survei IPP dan IPAK

No	Saran
1	Tolong fast respon
2	Terimakasih banyak untuk Tim Rorenkeu atas bantuan dan kerjasamanya yang sangat solutif dan responsif, terus dipertahankan dan tingkatkan
3	pelayanan yang sudah kami dapatkan sangat baik
4	Tetap semangat !!

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

1. Nilai IPP Biro Perencanaan dan Keuangan Bulan Maret 2025 mendapatkan nilai **3,82** dari skala 4 dari target 3,75. Nilai tersebut menunjukkan indeks Persepsi Pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan predikat **Sangat Baik**. Walaupun demikian, terdapat beberapa unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan performa layanan sebagai bagian dari peningkatan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan. *Stakeholder* merupakan *partner*, masukan dari *stakeholder* diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan *stakeholder* terhadap layanan, sehingga sinergi keduanya akan mendorong pemilik layanan publik memberikan pelayanan prima.

2. Hasil survei persepsi korupsi pada Biro Perencanaan dan Keuangan Bulan September 2024 diperoleh nilai IPAK **3,89** atau masuk kategori **BERSIH DARI KORUPSI** (kisaran nilai 3,25-4,00) dari target 3,75. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih, dan akuntabel, namun tetap perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai perbaikan akan diberikan pelatihan pelayanan publik *Excellent* dan meningkatkan internalisasi Nilai-nilai BerAKHLAK dan budaya kerja PIKKIR kepada seluruh pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan, serta sosialisasi kepada *stakeholder* secara rutin sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan bersih.

Jakarta, 10 April 2025

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara